

Pasar Cabai Murah Batal Digelar

Produksi petani turun, cabai dipasok dari Kupang.

MAKASSAR — Pasar cabai murah, yang semula akan digelar oleh pemerintah Sulawesi Selatan, batal dilaksanakan. Selain harga cabai di pasar mulai turun, produksi cabai petani mengalami penurunan.

“Rencana pasar cabai murah batal. Sebab, produksi cabai petani mengalami penurunan,” kata Kepala Seksi Pemasaran dan Penyebaran Informasi Dinas Pertanian Nurwanti Syam di Makassar kemarin.

Tahun lalu, operasi cabai digelar karena pada saat harga melambung, produksi cabai petani di Sulawesi Selatan sangat tinggi. “Tahun ini berbeda, produksi cabai petani memang menurun,” katanya.

Pada 2009, produksi cabai di Sulawesi Selatan mencapai 20 ribu ton, sedangkan pada 2010 turun menjadi 18,5 ribu ton. Tahun lalu, curah hujan sangat tinggi, sehingga banyak sentra produksi cabai gagal panen, seperti di Jeneponto dan Bone.

Menurut dia, tingginya harga cabai, yang pernah mencapai Rp

Produksi Cabai Sulawesi Selatan 2010

Kabupaten	Luas area (ha)	Produksi (ton)
Enrekang	74	449
Maros	27	230
Jeneponto	234	131
Bone	135	159
Pinrang	96	39
Tanatoraja	22	32
Sinjai	20	18
Sidrap	5	13
Toraja Utara	5	4
Gowa	2	4
Soppeng	20	3

80 ribu, karena ulah pedagang. “Harga di tingkat petani tetap seperti biasa, berada di kisaran Rp 15 ribu per kilogram. Pedagang yang mempermainkan harga, sehingga yang untung adalah pedagang, karena harga di petani tetap,” katanya.

Hal ini diakui oleh Daeng Azis, 46 tahun, pedagang di pasar Terong, Makassar. Produksi cabai di Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Selama ini, cabai dipasok dari Jeneponto, Bo-

ne, Sidrap, dan Enrekang, tapi karena produksi menurun, pedagang mendapat kiriman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.

“Cabai yang sekarang kami jual berasal dari Kupang sebanyak 120 kilogram yang dikirim melalui kapal selama tiga hari. Agar tidak membusuk, cabai diberi kanji agar tetap kering dan masih utuh hingga sampai di Makassar,” katanya.

Daeng Azis menambahkan, harga cabai turun menjadi Rp 50

ribu per kilogram. “Hari ini memang turun jadi Rp 50 ribu per kilogram, namun besok saya belum tahu sebab harganya terkadang naik sebagaimana sebelumnya yang mencapai Rp 80 ribu,” katanya.

Namun Daeng Azis membantah anggapan bahwa pedagang pengumpul seperti dirinya bisa memainkan harga. “Saya hanya pedagang pengumpul dari daerah. Harga cabai tidak bisa dipermainkan, sebab umurnya pendek dan mudah membusuk, sehingga kami terkadang menyuplai dari Gorontalo, Kupang, dan daerah lainnya. Tergantung mana yang memberikan keuntungan yang lebih banyak,” katanya.

Menurut data dari Dinas Pertanian, produksi cabai di Sulawesi Selatan hingga November 2010 sebesar 18,5 ribu ton. Produksi tersebut berasal dari 13 kabupaten di Sulawesi Selatan. Daerah penyumbang terbesar adalah Enrekang, yang menghasilkan 449 ton dari area seluas 74 hektare. ● SYAMSULMARLIN

Warga Tutup Kawasan Wisata Labombo

PALOPO — Sejumlah warga yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Surutanga (KKS) menutup kawasan wisata Pantai Labombo. Aksi itu terjadi karena pertemuan antara pemerintah kota, KKS, dan pengelola pantai menemui jalan buntu. “Warga Surutanga, yang merasa mempunyai hak di kawasan, kini merasa tersingkir,” ujar Ridwan, juru bicara warga, se usai pertemuan yang difasilitasi dewan perwakilan rakyat daerah di gedung Dewan kemarin.

Warga Surutanga mengklaim kawasan wisata Pantai Labombo merupakan tanah adat milik nenek moyangnya. Sejak 2009, setelah membayar ganti rugi lahan warga, pemerintah kota menunjuk CV Vista sebagai pengelola. Dengan harapan kawasan tersebut bisa dijadikan obyek wisata dan mendatangkan pendapatan bagi pemerintah.

Pengelola berkewajiban menyeter hasil pendapatan ke pemerintah sebesar Rp 5 juta per bulan. Singkat cerita, CV Vista lalu membangun sejumlah fasilitas di lokasi wisata pantai itu. Setiap pengunjung di pantai itu diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 5.000 per orang.

Namun warga Surutanga, yang merasa mempunyai hak di kawasan itu, memprotes. Apalagi, pedagang—sebagian besar warga lokal—diusir dari dalam kawasan pantai. Alasannya, kios yang dibangun mengganggu keindahan. “Bahkan warga yang berprofesi sebagai nelayan juga diminta membayar. Padahal perahunya ditambatkan di dalam,” kata Ridwan.

Reinandi, Kepala Badan Penanaman Modal Kota Palopo, mengatakan warga Surutanga sudah tidak berhak atas pengelolaan kawasan itu. Sebab, mereka sudah menerima ganti rugi. “Kawasan itu kini aset pemerintah,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah berhak memberikan pengelolaan itu kepada pihak ketiga tanpa membebani keuangan daerah. “Pengelola juga diwajibkan menyeter untuk pendapatan daerah.”

Direktur CV Vista Max Taruk Alla mengatakan ia tidak mempunyai masalah dengan warga. Sebab, dia hanya menjalin kerja sama dengan pemerintah. Max enggan menyebut dana investasi yang dikeluarkan untuk menata kawasan itu. “Tidak ada masalah uang yang saya keluarkan, tapi citra pemerintah yang jatuh,” katanya. Perihal tuntutan warga yang ingin diberdayakan dalam pengelolaan, Max mengaku siap mengakomodasinya. ● MUHAMMAD ADNAN HUSAIN



Menata Ponsel

Seorang pegawai toko sedang menata sejumlah telepon seluler produk asal Cina di sebuah mal di Makassar kemarin. Beredarnya rencana penutupan layanan BlackBerry di Indonesia membuat penjualan ponsel asal Cina meningkat.

Jamsostek Bidik 1.000 Perusahaan Kecil

MAKASSAR — PT Jamsostek Makassar membidik sekitar 1.000 perusahaan berskala kecil. Sebab, perusahaan tersebut ditengarai belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). “Sekitar 35 persen perusahaan kecil belum ikut program Jamsostek,” kata Kepala PT Jamsostek wilayah Makassar Basuki Siswanto saat dihubungi *Tempo* kemarin.

Menurut Basuki, perusahaan kecil tersebut bergerak di berbagai bidang usaha, seperti restoran, hotel (tipe melati), biro perjalanan, dan jasa konstruksi berskala kecil. Basuki menilai, diperlukan pemahaman secara menyeluruh tentang perlunya perusahaan mengikuti program Jamsostek. “Makanya, sosialisasi tentang program Jamsostek terus dioptimalkan hingga ke kabupaten dan kota,” katanya.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur nilai iuran sebesar 5,7 persen dari upah karyawan. Menurut dia, perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 10 orang dan memberi upah sesuai dengan upah minimum provinsi wajib mengikuti program Jamsostek.

Basuki mengungkapkan, periode 2010, jumlah tenaga kerja peserta

Jamsostek mencapai 118 ribu orang. Jumlah itu mencakup 3.263 perusahaan. “Jumlah peserta itu naik 3,4 persen dibanding periode 2009, yang hanya mencapai 114.510 orang,” ujarnya. Adapun hasil penerimaan iuran peserta periode 2010 mencapai Rp 126,7 miliar. Penerimaan iuran naik 2,4 persen dibanding pada periode sebelumnya, Rp 123,7 miliar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan Sa-

gaf Saleh menilai, sebenarnya, perusahaan diuntungkan oleh program Jamsostek. Sebab, dia menjelaskan, perusahaan tak perlu lagi mengeluarkan biaya, jika karyawannya sakit atau terkena musibah. Menurut dia, perusahaan semestinya sadar akan perlindungan bagi karyawan. “Yang menggerakkan perusahaan kan karyawan. Makanya perlu kesejahteraan mereka diperhatikan,” katanya. ● INDR A O Y.